

politik pada zaman Nabi⁶ dan Khulafaur Rosyidin. sebagai model dan contoh sistem kenegaraan menurut Islam.

Tujuan KH.A. Wahid Hasyim dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, pada hakekatnya adalah perjuangan untuk Islam, yang lebih dikenal dengan istilah "*jihad*" dalam Islam. Maka ketika Indonesia merdeka, kemerdekaan itu pada hakekatnya ialah kemerdekaan Islam. Setidaknya Islam harus mendapatkan tempat di alam Indonesia merdeka.

Suatu kelemahan dari konsep yang diajukan oleh KH.A.Wahid Hasyim dan wakil dari golongan Islam yang lain ialah tidak adanya konsep yang jelas tentang ideologi Islam itu sendiri. Mereka bersemangat untuk memperjuangkan ideologi Islam, tanpa penjelasan secara rinci dalam bentuk sila-sila dari ideologi Islam untuk Indonesia merdeka, sebagai bukti bahwa mereka tidak

6. Pada masa Nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin kaum muhajirin dan anshor telah terbentuk konstitusi, Piagam Madinah sebagai aktualisasi dari ajaran al-Qur'an dalam kehidupan sosio politik dan sosial budaya (Syafi'i Ma'arif, 1988:162). Untuk menegakkan suatu masyarakat pluralistik yang harmonis, maka piagam Madinah telah mewariskan prinsip-prinsip yang ideal yang banyak dicatat oleh sejarah sebagai konsep yang sempurna.

hanya meniru-niru Islam di Timur Tengah. Tetapi memang benar-benar ideologi atau dasar negara yang sesuai dengan realitas historis, sosial dan politik dari masyarakat Indonesia. Tidak adanya konsep yang mapan ini membuat nasionalis sekuler menolak ideologi Islam secara tegas dan menganggapnya itu untuk kebutuhan golongan belaka.

Pada sisi lain nasionalis sekuler⁷ terpenaruh oleh pemikiran Barat. Mereka berpendirian bahwa agama tidak mengatur masalah politik, dengan kata lain politik dan agama adalah sesuatu yang terpisah. Dalam dunia Islam aliran ini mirip dengan aliran yang dianut oleh Thoha Husein, juga senada dengan pendapatnya Qomaruddin Khan, yang mengatakan bahwa al-Qur'an sama sekali tidak menyediakan prinsip hukum ketatanegaraan (constitutio-

7. Dalam masyarakat kita, sekulerisme, sekulerisasi dan sekuler selalu diartikan pemisahan negara dan agama. Kata-kata itu mengandung arti pelepasan diri dari agama. proses pelepasan diri dari agama disebut sekulerisasi, dan proses ini terdapat bukan hana di masyarakat Barat, tetapi jua terdapat dalam masyarakat Islam. Perbedaannya, sekulerisasi di Barat membawa orang melepaskan diri dari seluruh agama, sedang dalam Islam pelepasan diri itu hanya pelepasan dari ikatan-ikatan tertentu dari agama dan orang masih tetap beragama (Harun Nasution, Al-Qur'an dan Sekulerisasi, Yogyakarta, Tiara wacana, 1994:iii)

nal law) ataupun teori politik. Sesungguhnya politik adalah sesuatu dan agama adalah sesuatu yang lain. Dan sistem pemerintahan dan pembentukan negara adalah atas dasar manfaat-manfaat amaliyah, bukan atas dasar sesuatu yang lain. Al-Quran tidak mengatur sistem pemerintahan, baik secara umum maupun secara khusus. Demikian juga pendapatnya Syaifulloh (1997:12). Lebih lanjut pendukung aliran ini berpendapat bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang Rosul biasa dengan tugas tunggal, yakni mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Muhammad tidak pernah ditugaskan untuk mendirikan dan mengepalai negara atau politik.

Nasionalis sekuler Indonesia selalu berorientasi Barat, karena mereka sebenarnya adalah didikan Barat. Barat yang hegemonik di mata mereka adalah negara yang paling maju dan paling berhasil dalam masalah politik, ekonomi, dan militer. Jika dibandingkan dengan negara Islam Timur Tengah. Kenyataan tersebut sangat tampak dari rujukan-rujukan dasar dari Pancasila Soekarno yang diajukan dalam sidang BPUPKI.

Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan dengan bangga dasar rujukan Pancasila. Untuk sila nasionalisme

dan internasionalisme adalah pengaruh dari Dr. Sun Yat Sen. Sila keadilan sosial, demokrasi dan kesejahteraan adalah pengaruh Sun Min Chu I. Ketika membahas sila ketuhanan, beliau tidak menyebutkan dari mana sebenarnya sumber pengaruhnya. Jelas itu adalah pengaruh dari nasionalis Islam yang sejak semula ngotot memperjuangkan dasar Islam. Kritik tersebut dilontarkan juga oleh Endang Saifuddin Anshori dalam bukunya "Piagam Jakarta 22 Juni 1945" (1997).

Kenyataan tersebut juga mendapat dukungan dari Supomo yang mendukung pendapatnya Hatta, untuk memisahkan agama dengan negara. Walaupun Supomo juga menjelaskan perbedaan antara "negara Islam" dengan "negara yang berdasarkan atas ajaran Islam". Namun tetap memilih negara yang terpisah dengan Islam. Supomo, Hatta beserta nasionalis sekuler yang lain tidak mau menerima Islam, dengan berdalih kekhawatiran terjadinya perpecahan dalam kubu Indonesia merdeka. Meskipun Islam sendiri memberikan jaminan bagi golongan yang lain, selain muslim. Mereka tetap menolak meskipun KH.A. Wahid Hasyim telah menjelaskan secara gamlang tentang hal tersebut dalam sidang BPUPKI.

Para nasionalis sekuler mengabaikan segala hal yang mengatasnamakan Islam. Mereka lebih memandang kemerdekaan ini atas nama kebangsaan demi persatuan. Sehingga menurut mereka Budi Oetomo adalah tonggak dari kebangkitan nasional sampai sekarang.

Soekarno, memberikan tempat bagi pembinaan ajaran Islam pada sila perwakilan dalam Pancasila. Ini sebenarnya adalah rekayasa Soekarno agar dapat mempersatukan bangsanya. Sebagai wujud rasa cintanya kepada bangsa mengalahkan cintanya pada agama. Rekayasa serupa ini juga muncul pada masa rezim Soekarno, ketika Indonesia hampir terpecah menjadi tiga golongan: nasionalis, komunis, dan agamis. Dalam keadaan demikian, Soekarno berusaha merangkul ketiganya dengan menggunakan istilah "NASAKOM" (nasionalis agama komunis).

Berangkat dari perbedaan yang variatif, dari orientasi, latar belakang, dan pendidikan, inilah para tokoh perumus konsep dasar negara RI mengalami suatu perbedaan yang sementara orang menilai itu adalah dominasi dari kepentingan golongan. termasuk KH.A. Wahid Hasyim sendiri. Satu lagi titik kelemahan dasar negara RI yang ditawarkan KH.A. Wahid Hasyim, yaitu kurang memberi kontribusi otoritas pada suatu komunitas

kultur, sosial ataupun adat yang pasti berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Hal semacam ini (kultur, sosial, dan adat) juga punya dampak bagi pemikiran atau pun konsepsi perumus yang lain.

Terlepas dari itu semua, maksimalitas dari pemikiran KH.A. Wahid Hasyim tentang konsep dasar negara yang diimplikasikan dalam bentuk pergerakan dan ipein Indonesia nasional tetap punya misi dan visi masalah *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang pada akhirnya nanti kembali untuk supremasi negara yang beragama Islam dan rakyat yang menjunjung nilai moral Islami.

B. Peran Perjuangan KH.A. Wahid Hasyim Dalam Penyusunan Dasar Negara RI

Dari jumlah wakil Islam yang hanya 25 persen dalam keanggotaan BPUPKI. Kelompok Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia kurang terwakili secara proporsional dalam badan penyelidik. Kenyataan tersebut sangat membantu golongan lain yang sejak semula menentang dasar negara Islam. Anak kalimat dalam sila pertama Piagam Jakarta: ... dengan berkewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya, berhasil dihilangkan oleh kelompok nasionalis sekuler. Dasar pikirannya

ialah kekhawatiran terhadap implementasi dari anak kalimat tersebut dan mendasarkan pada logika sektarianisme Islam. Menurutnya, kalimat itu kemungkinan besar akan menimbulkan fanatisme, karena kelihatannya kaum muslimin akan dipaksa mematuhi syariat.

Setelah KH.A. Wahid Hasyim menyangkal kekhawatiran adanya paksaan tersebut, dengan menunjuk pada asas permusyawaratan, mereka tetap tidak mau menerima alasan tersebut. Melalui lobi tidak formal terhadap seorang wakil nasionalis Islami, Ki Bagus Hadikusumo, yang hadir dalam sidang PPKI, anak kalimat tersebut berhasil dihilangkan. Dengan orientasi persatuan yang harus lebih diutamakan dan untuk menghindari segala kemungkinan perpecahan yang akan terjadi, nasionalisme Islami menerima alasan tersebut. Kaidah yang menjadi dasar pertimbangannya adalah *Dar al mafasid muqoddamun alaa jalb al-masholih*

(Abdul Hamid Hahim, tt:25) " Menghindari bahaya lebih diutamakan dari pada pelaksanaan masalah", menjadi pertimbangan yang kuat.

Dari segi ini dapat dilihat toleransi pemeluk Islam, yang dengan ikhlasnya tidak memaksakan konsep-sinya. Memang besar kemungkinan, berdasarkan pembicaraan-pembicaraan yang berkembang dalam sidang BPUPKI, bahwa ketidakmampuan wakil-wakil Islam dalam mengajukan konsepsi negara yang berdasarkan Islam itu mengandung alasan tersendiri. Satu di antaranya adalah kenyataan, bahwa Indonesia yang akan berdiri itu tidak sepenuhnya dihuni oleh penduduk muslim. Jaminan yang digariskan bagi pemeluk agama lain nampaknya tidak menghilangkan citra bahwa dasar berdirinya negara Indonesia adalah Islam. Namun begitu, para nasionalis Islami telah berhasil memperjuangkan nilai dasar dari Pancasila, yakni nilai *tauhid* yang mendasari sila-sila yang lain.

Menurut KH.A. Wahid Hasyim, kata "Ketuhanan Yang Maha Esa" sesuai dengan tauhid dalam Islam. Karena hanya Islamlah yang mengakui keesaan Tuhan. Meskipun kata-kata itu juga sangat mungkin diartikan dengan makna lain oleh pemeluk agama lain. Hal ini juga diakui oleh Ma'arif dalam bukunya *Islam dan Politik* (1988:30).

Dalam hal ini, mantan menteri agama Alamsyah Ratu Perwiranegara, berpendapat demi menjaga persatuan, peristiwa 18 Agustus 1945 itu dianggap sebagai hadiah

umat Islam kepada bangsa dan kemerdekaan Indonesia. Tanpa bantuan dan pengorbanan umat Islam, Pancasila tidak akan ada di Indonesia. Hal ini ditempuh tidak lain karena keinginan umat Islam untuk membentuk persatuan dan kemerdekaan sehingga lahirlah Pancasila seperti yang dikenal sekarang ini. Di sinilah letak pengorbanan dan hadiah umat Islam itu.

Sasaran akhir perjuangan Islam, dalam konteks umat Islam Indonesia adalah bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia dengan pola pembangunan yang mengikuti tuntunan Allah SWT, Sehingga memperoleh ridlo-Nya. Dengan pola pembangunan yang sesuai tuntunan Ilahi itulah rakyat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini baru akan mencapai kondisi sejahtera, dari generasi ke generasi. Pencapaian kondisi itu diharapkan dapat mendekati kondisi yan sudah dicontohkan dan didemonstrasikan oleh Nabi Muhamad dengan negara dan rakyat Madinahnya yang telah mengatur kaum muslim ke arah keemasan.

Sedangkan bagi golongan nasionalis, sasaran perjuangannya adalah terbentuknya negara kesatuan yang berasas kebangsaan. Suatu negara yang tidak terikat oleh salah satu agama, tetapi dapat mengayomi seluruh

agama yang ada di negara tersebut. Negara kebangsaan sebagai Wujud dari rasa cinta terhadap tanah airnya, yang telah memberikan hidup dan kehidupan kepada warga negara. Dengan demikian kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, tanpa ada yang merasa tersisihkan.

Perjuangan dasar Islam dalam sidang BPUPKI adalah proses perjuangan yang berkonotasi idealis, suatu perjuangan yang bertolak dari pandangan pentingnya perjuangan umat untuk berorientasi pada tahapan menuju "Islam cita-cita" (ideal Islam). Islam cita-cita adalah Islam sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan Sunnah yang autentik, tetapi yang belum tentu tercermin dalam tingkah laku sosio politik umat Islam dalam realitas sejarah mereka. Islam cita-cita juga mengandung pandangan dunia seorang muslim yang dibentuk oleh wahyu, tetapi pandangan dunia ini belum lagi dirumuskan secara tuntas dan sistematis pada masa modern sekarang ini.

Islam cita-cita dianggap sebagai kekuatan penggerak (*driving force*) dari seluruh perjuangan dan gerakan Islam, baik itu politik, sosial, maupun kultural. Adapun orientasi Islam cita-cita, akan menantarkan

umat Islam menjadi umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia (Q.S.3:110), sehingga bermakna bagi kemanusiaan sebagai umat teladan. Dalam realitas historis umat, Islam cita-cita telah maujud dengan nyata dan telah diterjemahkan pada masa Nabi muhamad dan beberapa tahun setelah wafatnya, tetapi menjadi Inspi-rasi yang tak habis-habisnya oleh umat Islam dari waktu ke waktu.

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa sekali-pun nilai-nilai dan ajaran Islam bersifat universal, pelaksanaan ajaran itu sendiri menuntut pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan sosio-kultural masyarakat Indonesia secara keseluruhan, termasuk lingkungan politik dalam kerangka konsep "Negara bangsa" (nation state). Kenyataan obyektif bahwa Indonesia merupakan suatu bangsa yang mempunyai heterogenitas tertinggi secara fisik (negara kepulauan), maupun dalam soal keagamaan, suku, bahasa ddaerah, adat istiadat, dan bahkan agama. Dengan demikian setiap langkah melaksana-kan ajaran Islam di Indonesia harus memperhitungkan kondisi sosio-budaya yang ciri utamanya adalah pertum-buhan, perkembangan dan kemajuan.

Pemikiran tersebut juga didukung oleh KH. Abdurrahman Wahid dengan konsep pribumisasi Islam. Gagasan ini didasarkan pada postulat bahwa berdirinya negara Indonesia, lebih disebabkan oleh adanya kesadaran berbangsa, bukan hanya sekedar karena faktor ideologi Islam. Ini adalah kenyataan yang harus diterima secara obyektif. Islam sebaiknya diperankan sebagai komplementer bagi komponen-komponen yang lain. Dengan demikian ia tidak akan berfungsi sebagai faktor tandingan yang akan berfungsi disintegratif terhadap kehidupan berbangsa secara keseluruhan.

Dalam strategi perjuangannya, Abdurrahman Wahid memakai arus bawah untuk memperkuat lembaga demokrasi. Kalau demokrasi dijalankan dengan baik, maka dengan sendirinya umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia akan terwakili secara proporsional di lembaga-lembaga kenegaraan. Demikian pendapat Abdurrahman Wahid yang ditulis Arif Budiman dalam buku *Demokrasi Atas Bawah* (1997 : 40).

Menurut Abdurrahman Wahid, kegagalan atau kurangberhasilan wakil Islam dalam perjuangan dasar negara disebabkan kekuatan ideologis Islam yang besar itu hanya berada pada level atas saja, sementara duku-

Kelima, aliansi kelompok nasionalis dan kristen yang cukup kuat dalam peristiwa 18 Agustus 1945. Aliansi ini menemukan momen yang tepat sebagai titik kulminasi untuk membat habis aspirasi politik Islam yang diwujudkan dalam kompromi final tanggal 14 dan 16 Juli 1945. Kepentingan pihak Kristen ingin menghapus anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", sedangkan kepentingan pihak kebangsaan ingin menghapus keterangan "yang beragama Islam" bagi Presiden Republik Indonesia, bahkan wakil pihak yang terakhir ini berhasil menduduki kursi presiden dan wakil presiden.

Setidaknya ada tiga alasan, bagi KH. A Wahid Hasyim dan segenap golongan Islam untuk menerima perubahan-perubahan yang kurang menguntungkan umat Islam, sebagai konsekwensi dan tuntutan wakil Kristen bagian timur Indonesia dalam sidang PPKI berlangsung. Wakil Islam bersikap positif, tidak memaksakan idiologinya bahkan rela menerima perubahan setelah dicapai kesepakatan bersama.

Alasan pertama, golongan Islam yang menghapus tujuh dalam Piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut interpretasi KH. A Wahid Hasyim adalah nama lain dari tauhid dalam Islam.

Alasan kedua suku polik sehari setelah kemerdekaan Indonesia terutama di Jakarta sangat tinggi. Mereka tidak bermaksud menciptakan suasana ketidakentraman lagi hanya karena perdebatan-perdebatan yang berkepanjangan, padahal negara yang baru lahir butuh konstitusi.

Ketiga golongan Islam berharap bahwa enam bulan setelah Proklamasi akan diadakan Pemilihan Umum di mana mereka akan ikut serta. Kalangan Islam sangat optimis bahwa proklamasi akan diikuti stabilitas di mana pemilu akan segera berlangsung. Dan mereka yakin akan menangkannya mengingat jumlah penduduk mayoritas Islam. Soekarno sendiri pernah menjanjikan hal tersebut.

Golongan Islam merupakan kelompok mayoritas secara politis memang sangat kuat. Namun keberadaan negara Indonesia terakomodasi oleh kultur yang beragam, sehingga pemaksaan terhadap dasar negara dengan dasar Islam akan menjadi kendala yang mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar.